



Sutarmidji Minta Kinerjanya Diawasi Media



ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI/PRAS

SALAM KOMANDO - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kiri) bersama Wakil Gubernur Ria Norsan (kanan) melakukan salam komando usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9) lalu.

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta media untuk memantau kinerja dirinya dan Ria Norsan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023.

"Saya mengajak masyarakat dan media untuk terus memantau kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Terus pantau, karena saya tidak ingin ada belanja fiktif, ada *mark up*. Saya tidak ingin ada penyimpangan di keuangan daerah," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu (12/9).

Sebagai pemimpin di Kalbar, dirinya berjanji tidak akan melakukan penyimpangan anggaran. Untuk itu, dirinya juga memastikan tidak memberikan toleransi bagi aparatur negara yang melakukan penyimpangan keuangan daerah.

"Saya tidak ada toleransi apapun, selain harus bertanggungjawab kepada hukum," katanya.

Untuk itu, Sutarmidji mengingatkan agar aparatur negara tidak mengikuti kebijakan yang dibuat, jika itu bertentangan dengan peraturan.

• Baca Halaman 15



Hal 9 ■ **sutarmidji minta**

an.
Apalagi, jika itu sebenarnya menjadi kewenangan kepala OPD yang diberikan peraturan.

“Sehebat apapun otoritas, sepanjang aturan tidak membenarkan itu, jangan ikuti perintah saya,” katanya.

Sutarmidji menambahkan, dirinya akan bekerja fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sutarmidji, meyakini, percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dia juga mengingatkan bahwa penyelenggara negara itu sudah dibayar. Jika ingin mendapatkan penghasilan lebih, Sutarmidji menyarankan pejabat negara maupun ASN untuk mencari usaha lain dan itu tidak berkaitan dengan APBD.

“Sebagai gubernur saya sudah dibayar, ada uang taktis.

Ada biaya rumah tangga, apalagi. Ini uang masyarakat tentu mereka berhak merasakannya dari gencarnya pembangunan,” katanya.

Di samping itu, Sutarmidji meminta kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalbar untuk melakukan tata kelola keuangan daerah dengan transparan.

“Harus ikuti aturan yang ada karena saya tidak mau ada penyimpangan apapun dan sebesar apapun dalam keuangan daerah. Digunakan untuk apapun silakan, sepanjang sesuai Musrenbang dan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Dikatakannya, Pemprov Kalbar akan mengalokasikan anggaran yang berkeadilan untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalbar.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata, menurutnya perlu sentuhan-sentuhan yang tidak sama antara kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota lainnya di Kalbar.

“Sentuhan-sentuhan ini parameternya adalah kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat, dan harus buka daerah-daerah yang masih terisolir,” tuturnya.

Sutarmidji juga menegaskan tindak korupsi akan memperlambat pembangunan yang dicanangkan Midji-Norsan.

“Pemerintahan yang bersih akan mempercepat pembangunan Kalimantan Barat. Sedangkan sebaliknya, tindak pidana korupsi akan memperlambat pembangunan yang dicanangkan oleh saya bersama Ria Norsan. Karena, percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan menjadi program prioritas kami,” jelas Sutarmidji.

Sutarmidji juga menjelaskan bersama Ria Norsan akan menjamin pemerintahan yang bersih dari korupsi. Bahkan, mantan Wali Kota terbaik se-Indonesia tahun 2017 tersebut mengatakan bahwa mereka akan jamin Kalimantan Barat bersih dari korupsi.

“Korupsi dapat menghambat pembangunan Kalbar dan itu bertentangan dengan program. Saya bersama Ria Norsan untuk mewujudkan percepatan pembangunan. Saya jamin bersama Ria Norsan, kami akan menciptakan tata kelola pemerintahan terbaik di Kalimantan Barat dan tentu bersih dari korupsi,” jelasnya.

(ant/bob)